

▪ **Aditya Permana dan Risyad Mulki Prawira**

Universitas Bina Nusantara

Kontribusi Aktivitas Volunteristik Kaum Muda terhadap Sosialisasi dan Institusionalisasi Identitas Regional Asia Tenggara Melalui *ASEAN Youth Voluntary Program* (AYVP) 2013 – 2016

A B S T R A K

Identitas regional negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN umumnya diringkas dalam terma “*Unity in Diversity*”, sebagai slogan demokrasi desa khas Melayu, dengan normatif pelaksanaannya berwujud *the ASEAN Way*, yakni sistem pembuatan-keputusan bersama berupa diplomasi berbasis proses informal, non-legalistik, berbasis konsensus, dan didorong oleh proses. Ciri ini meninggalkan banyak ruang kosong bagi interpretasi, yang salah satunya diisi oleh kegiatan volunteristik dari kaum muda dalam menerjemahkan fluiditas definisi identitas kawasan tersebut. Penelitian kualitatif ini melihat kontribusi *ASEAN Youth Voluntary Program* (AYVP) sebagai organisasi kaum muda volunteristik ASEAN yang berupaya mensosialisasikan, menginstitusionalisasi, dan mereifikasi identitas kawasan ASEAN melalui kegiatan-kegiatan mereka yang berorientasi pada dimensi sosio-kultural, salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN menurut Bali Concord II 2003.

Kata kunci: volunterisme, kaum muda, ASEAN, identitas regional

1. Latar Belakang

Identitas regional ASEAN merupakan sebuah konsep yang diperdebatkan. Mengutip Pham Quang Minh (2013), menurut Pasal 1 Piagam ASEAN, salah satu tujuan ASEAN adalah “mempromosikan identitas ASEAN melalui pembinaan kesadaran yang lebih besar akan beragam budaya dan warisan kawasan ini.” Dalam ASEAN Vision 2020 yang dikeluarkan pada bulan Desember 1997 selama pertemuan tahunan di Kuala Lumpur,

Malaysia, salah satu arahnya adalah “membayangkan keseluruhan Asia Tenggara pada tahun 2020 sebagai sebuah komunitas ASEAN yang menyadari hubungannya dengan sejarah, menyadari warisan budaya mereka, dan terikat oleh identitas regional yang sama.” Visi ini juga menekankan bahwa kawasan Asia Tenggara akan menyatu ketika “semua orang menikmati akses yang adil terhadap kesempatan pembangunan manusia secara total” di bawah nama “Komunitas Masyarakat Peduli.” Dari pernyataan

tersebut nampak bahwa organisasi bukan hanya tentang kehendak politik, namun juga pertanyaan bagi orang-orang mengenai persepsi diri mereka sebagai warga kawasan, dan apakah mereka melihat diri mereka berbagi satu identitas yang terdiri atas beragam budaya dan warisan yang diikat oleh keserupaan sejarah (Minh, 2013: 171). Catatan menarik, istilah “komunitas” baru disebut secara resmi tahun 1997, 30 tahun setelah berdirinya ASEAN, dan baru dimaterialisasi bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada 2003 pada Bali Concord II. Setelah Bali Concord II, dirilislah Piagam ASEAN 2007 yang bertujuan membangun fondasi ASEAN yang lebih kokoh dalam naungan organisasi yang beralaskan hukum. Istilah “identitas ASEAN” juga baru muncul di Bali Concord II (Murti, 2016).

Namun demikian, menurut Jones (2004) tidak pernah jelas mengenai apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “identitas umum kawasan” (*common regional identity*). Dalam Jönsson (2010), Jones menyatakan bahwa solidaritas, kerjasama, pasar yang lebih terintegrasi serta masyarakat yang lebih terbuka menjadi kesempatan untuk mendefinisikan identitas, namun secara praktik nyaris tidak mengatakan apapun tentang penciptaan identitas umum tersebut (Jönsson, 2010: 43). Jönsson meneruskan bahwa identitas regional merupakan proyek (politis) para elit dan proyek penciptaan identitas kawasan ini mustahil, kalau bukan sulit. Banyak faktor yang merentang dari perbedaan etnis, bahasa, agama, budaya, sejarah bangsa, kelas sosial, pendapatan; perbedaan dalam menanggapi globalisasi; konflik, sengketa, dan sentimen yang belum terselesaikan di antara anggota-anggotanya; dan seterusnya (Jönsson, 2010: 43).

Di sisi lain, Minh dan Guan memandang lebih positif identitas regional

ASEAN. Melalui perspektif neo-realisme, keduanya mengatakan bahwa ASEAN lahir dalam suasana Perang Dingin dan mengambil posisi non-blok bersama negara-negara di kawasan Afrika sehingga mampu menjadi *balance of threat* di tengah persaingan dua blok global. Namun setelah krisis ekonomi Asia Tenggara 1997, hingga sekarang ASEAN terancam oleh pengaruh pihak luar karena sistem unipolar yang justru berpotensi menghancurkan sikap non-blok tersebut. Dari perspektif institusionalisme liberal, Minh memandang ASEAN, melalui “*The ASEAN Way*”, mencatat sukses sebagai mediator konflik. Pencapaian ini dibuktikan dalam rangkaian inisiatif yang dipimpin ASEAN yang diakui masyarakat dunia. Sebagai contoh, berdirinya sebuah dialog dengan Komunitas Eropa 1972, *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) 1989, Forum Kawasan ASEAN 1994, pertemuan ASEAN-plus three setelah 1997, dan *East Asia Summit* 2005. Dalam hal keamanan, contoh kontribusi ASEAN dapat dilihat dalam *Paris Agreement* tentang konflik Kamboja 1991 dan penyelesaian damai Kepulauan Spratly. Di sektor ekonomi, ASEAN menandatangani kesepakatan untuk membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) tahun 1992 (Minh, 2013: 171-172; Guan, 2004: 71-72).

Sedangkan dari perspektif konstruktivisme, Minh memandang bahwa bagaimanapun ASEAN adalah komunitas yang unik. Melalui *ASEAN way* sebagai sintesis dari faktor inter-subjektif berupa komponen material (kekuasaan dan kemakmuran ekonomi), serta komponen immaterial (norma, standar, kebijakan, nilai-nilai, dan tradisi selama 50 tahun) cukup berhasil membuat organisasi ini tetap eksis untuk membangun dan menyinambungkan identitasnya (Minh, 2013: 172). Dalam

konteks serupa, Acharya dan Layug (2017) memaparkan bahwa formulasi identitas regional ASEAN merupakan langkah relevan dalam membentuk politik keamanan, kerjasama ekonomi regional, dan hubungan internasional yang damai di Pasifik. Keduanya memiliki empat argumen untuk mendukung hipotesis ini. *Pertama*, kurangnya lembaga alternatif di kawasan Asia Pasifik yang mampu berperan sebagai tumpuan normatif dalam menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan regional dan melegitimasi perilaku negara yang secara alami menganggap ASEAN memiliki identitas sebagai pusat kelembagaan regionalisme Asia Pasifik. *Kedua*, identitas primordial ASEAN sebagai komunitas keamanan yang baru lahir meletakkan fondasi untuk regionalisme normatif, dengan *ASEAN Way* (diplomasi berbasis proses informal, non-legalistik, berbasis konsensus, didorong oleh proses), gagasan, norma (baik substantif maupun prosedural, serta politik hukum dan sosial budaya). *Ketiga*, ASEAN dipandu oleh jenis sosialisasi tertentu yang memungkinkan negara-negara anggotanya mengejar tujuan instrumental dan normatif berdasarkan logika konsekuensi dan logika kesesuaian. *Keempat*, norma-norma ASEAN menciptakan kemungkinan mengubah kepentingan dan identitas aktor regional, dalam rangka mengubah tatanan regional di luar *modus vivendi* (kesepakatan sementara) dan “menghasilkan perilaku kontra-*realpolitik* di negara-negara yang sedang disosialisasikan” (Acharya and Layug, 2017).

Berdasarkan signifikansi dan urgensi keamanan maupun ekonomi di kawasan Asia Tenggara, pembentukan identitas kolektif memang prioritas, bagaimanapun problematisnya. Dari Acharya dan Layug di atas dapat ditarik kesimpulan sementara

bahwa pembentukan identitas kolektif memiliki motif tertentu yang sifatnya merentang dari yang paling instrumental (baik secara politis maupun ekonomis) hingga paling altruistik (sebagai mediator konflik atau institusi normatif). Aktor yang melakukan penciptaan identitas tersebut juga merentang dari level elit hingga akar rumput. Relasi antara yang makro, meso, dan mikro ini tidak selalu kongruen, sehingga diskusi (dan fiksasi) mengenai identitas kolektif secara ontologis berisiko sia-sia, terlebih dalam sistem antar-bangsa yang anarkis. Dalam konteks pembentukan identitas regional ASEAN pun dapat kita lihat bahwa konsepsi atau diskusi mengenai identitas secara eksplisit muncul secara simultan dengan diskusi mengenai komunitas keamanan dan ekonomi regional yang justru menjadi titik berat Piagam ASEAN 2007. Betul bahwa apapun yang muncul dari itu terikat oleh *Treaty of Amity and Cooperation* 1976 yang memberikan landasan legal bagi relasi antar-negara anggota ASEAN. Namun banyak konflik dan sengketa bilateral maupun multilateral masih menjadi preseden, persis karena karakter *ASEAN Way* itu sendiri yang menghindari interferensi dan karakter konsensualnya yang mengakibatkan lamanya proses pengambilan keputusan.

Identitas kolektif berupa identitas regional dapat dilihat dari berbagai macam perspektif. Secara umum hipotesis tulisan ini adalah bahwa identitas kolektif bukan merupakan kenyataan objektif, melainkan penafsiran inter-subjektif dan berada dalam tegangan yang dinamis di dalam setiap levelnya, serta merupakan reifikasi kepentingan politik dan ekonomi. Di sisi lain, identitas kolektif tidak hanya soal kepentingan dan motif politik-ekonomi semata, melainkan pula dapat berproses melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis

altruisme, contohnya melalui kegiatan sukarela dalam penanganan bencana alam dan tanggap bencana. Justru pada titik ini seringkali pembicaraan mengenai identitas menjadi ambivalen – semakin relevan sekaligus pula semakin tidak relevan (Bauman, 1991: 67-68). Sebagai contoh, dalam bencana Tsunami Samudera Hindia 2004 yang menimpa Aceh dan menimbulkan kehancuran hingga Bangladesh, Malaysia, Thailand, India, Singapura, dan Maladewa, para relawan transnasional dan orang-orang dari segala lapisan tanpa pandang bulu saling membantu di bawah satu panggilan kemanusiaan. Tidak ada identitas eksklusif, hanya ada identitas kosmopolit yang inklusif sebagai warga dunia yang berpijak di atas landasan kemanusiaan universal.

Voluntarisme menjadi penting, sebab Ozawa (2010) mengatakan bahwa masyarakat terdiri atas tiga sektor, yakni sektor pemerintahan, sektor ekonomi, dan sektor voluntaristik. Ozawa menambahkan bahwa sektor voluntaristik sangat penting karena memiliki kekuatan untuk menyingkap permasalahan-permasalahan sosial yang tersembunyi dan mengangkatnya ke publik. Sektor ini acap memiliki inisiatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut melalui kelompok-kelompok voluntaristik seperti NGO dan NPO yang berperan sebagai pilar “masyarakat demokratis” yang sehat, aman, dan damai (Ozawa, 2010).

2. Voluntarisme Kaum Muda

Dalam konteks Asia dan Pasifik, peran untuk mewujudkan masyarakat sipil demokratis semacam ini berada di tangan kaum mudanya. Menurut UNICEF EAPRO (2008), penting bagi kaum muda untuk berperan dalam keikutsertaan sipil (*civic engagement*) karena keikutsertaan ini

merupakan salah satu indikator demokrasi yang baik. Kaum muda merupakan agregat terbanyak dalam populasi sebuah negara sehingga memegang kunci masyarakat demokratis yang dicita-citakan. UNICEF EAPRO merilis sepuluh rekomendasi untuk mendukung keikutsertaan sipil bagi kalangan muda, yang salah satunya berisi pertimbangan untuk mendukung skema voluntarisme regional (UNICEF EAPRO, 2008). Poin inilah yang menyambungkan antara peran kaum muda terhadap masyarakat sipil yang demokratis melalui kegiatan voluntarisme yang bersifat regional.

Tidak ada kesepakatan dalam pendefinisian pemuda (*youth*) dalam literatur. Stanley Hall (1904) memasukkan pemuda dalam fase kehidupan individu yang disebut *adolescence* (masa remaja), yakni kelompok umur yang atribut utamanya berkenaan dengan dependensi, pra-pubertas, mulainya masa pembelajaran tentang seksualitas dan persiapan tanggung jawab sosial (Hall, dalam Arnett dan Cravens, 2006: 168). Hollingshead mengatakan bahwa pemuda adalah “periode dalam usia individu ketika fungsinya dalam masyarakat melepaskannya dari fungsi kanak-kanak namun belum memberinya fungsi, status, dan peran total sebagai orang dewasa” (Hollingshead, 1949: 6-7). PBB misalnya, mendefinisikan “pemuda” untuk keperluan statistik, “orang-orang yang berusia di antara 15-24 tahun tanpa adanya *prejudice* dari negara-negara anggotanya.” UNESCO memberi definisi pemuda sebagai kategori yang cair, “periode transisi dari dependensi masa kanak-kanak ke independensi masa dewasa dan kesadaran akan interdependensinya sebagai anggota komunitas masyarakat” (UNESCO, 2017). Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, Kementerian

Pemuda dan Olahraga Indonesia mendefinisikan “pemuda” sebagai “warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”, dan “kepemudaan” sebagai “hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.” Namun dalam konteks ASEAN, yang dimaksud dengan pemuda adalah kelompok umur 17-30 tahun. Dengan asumsi ini, kalangan muda mencakup nyaris 60% dari total populasi Asia Tenggara.

Pemuda, dalam ciri-ciri umumnya, merupakan suatu fase transisi ketika seorang individu menuju ke kedewasaan. Fase ini seringkali dilalui dengan banyak obligasi dan tegangan dengan ego pribadi yang menempatkan mereka sebagai subjek sekaligus korban paling rentan dari dinamika sosial, dari level lokal hingga global. Wyn dan White menunjukkan bahwa selain ciri-ciri umum ini, kaum muda juga memiliki kebutuhan yang sangat spesifik secara sosial (Wyn and White, 1997: 3). Pemuda, dalam hal ini dibicarakan sebagai kategori sosio-politik yang seringkali dikategorikan dan diasosiasikan sebagai agen perubahan yang penuh *passion* dan idealisme. Namun di sisi lain kecenderungan untuk membuat perubahan itu seringkali terbentur oleh kebelumcakapannya membuat keputusan-keputusan (politik) yang membutuhkan jangkauan nalar, pengalaman, dan pertimbangan yang matang dan “dewasa”. Di samping itu, mereka juga belum cakap dalam mengelola sumber-sumber daya ekonomi agar menemui manfaat untuk sebanyak mungkin demi kepentingan publik. Namun demikian *passion* dan idealisme, ditambah kebutuhan mereka untuk diakui dan menjadi

sosok yang berpengaruh, memiliki potensi untuk diarahkan menjadi agen altruistik.

Pemuda penting dipelajari sebagai aktor yang relevan dalam proses pembangunan. Masa muda merupakan proses transisi ke kehidupan dewasa untuk setiap individu yang mencerminkan proses individual dan kolektif. Sifat “pemuda” adalah hasil proses sosial dan politik yang melaluinya ketimpangan sosial dibangun dan direkonstruksi. Kaum muda penting karena merefleksikan hasil perjuangan politik atas prioritas yang diberikan kepada publik. Dalam kasus ini, akumulasi kekayaan swasta dan kemudahan akses publik oleh kelompok-kelompok spesifik dapat memiliki dampak langsung pada kaum muda. Contohnya dalam masyarakat yang menekankan pada sektor publik yang kuat, termasuk sistem pendidikan, transportasi, dan kesehatan masyarakat yang layak (serta fasilitas umum lainnya seperti taman, kolam renang, fasilitas olahraga), kaum muda dapat tumbuh dewasa tanpa mengalami dampak terburuk dari diferensiasi sosial, misalnya menjadi anak jalanan atau gelandangan. Sebaliknya, ketika perebutan akses publik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan hak fundamental lainnya untuk hidup beradab itu demikian keras, kaum muda akan menjadi pecundang terbesar. Pada titik ini, urgensi untuk mempelajari kaum muda sangat tinggi karena mereka kemudian akan terlibat dengan institusi yang mempromosikan keadilan sosial dan sangat menentukan sebagai indikator “*cost and benefit*” yang nyata dari sistem politik dan ekonomi masyarakat (Wyn and White, 1997: 6).

Voluntarisme kemudian menjadi penting karena secara umum kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang terhadap kaum muda, menurut Wyn dan White, memasukkan *youth policy* ke dalam sistem

edukasi. Upaya ini mereduksi kaum muda sebagai semata-mata kelompok *mainstream*, homogen, dan kelompok bermasalah yang perlu “dikembalikan lagi menuju barisannya” (Wyn and White, 1997: 7). Ini menggambarkan adanya *problem* inheren dalam diskusi mengenai kaum muda. Kaum muda, dalam banyak pembahasan, merupakan kategori yang tidak muncul secara imanen, *per se*, pada-dirinya-sendiri, melainkan selalu ditempatkan ke dalam konstruksi relasi proses-proses sosial, seperti sekolah, keluarga, dan pasar tenaga kerja. Secara logis, hal ini merupakan hambatan atau tantangan kaum muda dalam merealisasikan idealisme mereka ketika berada dalam relasi-kuasa dengan elit. Kegiatan voluntaristik merupakan salah satu cara bagi pemuda dalam proses *channeling* ini.

Menurut Olate (2007), kegiatan voluntaristik merupakan sebuah kunci dari sebuah masyarakat yang madani (*civil society*). Ia menjelaskan bahwa mengapa kegiatan ini ditujukan kepada kaum muda. Bagi Olate, kaum muda mempunyai *passion* yang sangat tinggi. Di samping itu pemuda mempunyai pemikiran yang kreatif, inovatif, dan kolektif. Maley, Dennis, dan Eckenrode (2015) memetakan motivasi seseorang menjadi sukarelawan, yakni:

Tabel 1. Motivasi Kegiatan Sukarela

Inventarisasi Fungsi Relawan (IFR)		
No.	Motivasi IFR	Definisi
1.	Nilai (motivator yang paling sering teridentifikasi)	Altruisme, kepedulian kemanusiaan terhadap orang lain, melakukan sesuatu yang berarti
2.	Pengertian (kepentingan menurun dengan usia relawan)	Kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan, rasa menjadi seorang yang penting bagi organisasi
3.	Sosial	Berada bersama atau berteman
4.	Karier	Manfaat atau keterampilan terkait karir, menantang kerja, tanggung jawab
5.	Protektif	Kesukarelaan untuk mengurangi perasaan negatif, mengalihkan fokus dari masalah pribadi, mengurangi rasa bersalah atas hak istimewa pribadi
6.	Peningkatan	Kepuasan dari pertumbuhan pribadi dan harga diri, menciptakan suasana hati yang positif

Sumber: Maley, Dennis, & Eckenrode, 2015

Hustinx dan Lammertyn (2003) menjelaskan bahwa kegiatan sukarela sebagai sebuah kerangka sosial dapat membentuk suatu ide kolektif. Voluntarisme kolektif meliputi aksi atau tujuan yang dikoordinasikan, ditetapkan, dan termonitor. Pandangan ini sangat berhubungan dengan komunitas atau kelompok homogen sehingga para sukarelawan ini saling membagi

kebutuhan dan keinginan mereka satu sama lain dan membentuk *the sense of "we."* Hustinx dan Lammertyn menjabarkan enam klasifikasi kegiatan sukarela; yakni (1) *biographical frame of reference*, yakni sebuah interaksi antara kondisi biografis individu (motivasi, waktu, dan kesempatan) dengan pengalaman mengenai kegiatan sukarela; (2) *motivational structure*, yakni upaya melakukan kegiatan voluntarisme kolektif atas dasar orientasi komunal (gotong-royong); (3) *the course and intensity of commitment*, yakni kerangka kolektif berdasarkan kuatnya identitas kelompok untuk memastikan kehidupan yang terus-menerus dan dapat diprediksi; (4) *organizational environment*, yaitu pembangunan organisasi sukarela yang formal, yang disusun berdasarkan sistem yang tersegmentasi dari kelas sosial yang berbeda, baik agama maupun ideologi berdasarkan kepentingan bersama; (5) *the choice of (field of) activity*, yakni penetapan pilihan berdimensi politik untuk beraktivitas dan beraksi dalam kegiatan sukarela, ditentukan oleh afinitas berdasarkan ideologi, keyakinan agama, dan identitas yang kolektif oleh suatu kelompok politik; (6) *the relation to paid work(er)*, voluntarisme kolektif mempunyai hubungan erat dengan kehidupan yang berasosiasi dengan keterlibatan untuk melakukan niat baik. Umumnya voluntarisme kolektif melibatkan tindakan sukarela yang dimulai, ditetapkan, dan diawasi oleh kelompok, terlepas dari niat atau preferensi dari individu anggota kelompok (Hustinx dan Lammertyn, 2003: 173). Tentu hal ini tidak menjelaskan banyak tentang identitas kolektif ASEAN yang demikian heterogen. Akan tetapi, kedekatan motivasi dan pengalaman pahit bersama, dalam hal ini bencana alam, serta

keterlibatan empati dan motif altruistik dapat dijustifikasi menjadi faktor pemersatu.

3. Identitas Regional ASEAN dan *The ASEAN Way*

Sebagaimana identitas nasional, terma identitas regional juga merupakan suatu konsep yang lebih banyak memicu perdebatan alih-alih kesepakatan. Namun bagaimanapun terma ini sangat membantu penentuan landasan dan tujuan hidup bersama dalam komunitas tersebut. Identitas dapat dimaknai secara esensialistik maupun secara fungsional. Mengutip Rogers Brubaker dan Frederick Cooper, Acharya menandakan bahwa identitas memiliki lima fungsi, yakni sebagai landasan atau basis tindakan sosial atau politik, fenomena kolektif yang menunjukkan beberapa tingkat kesamaan di antara anggota kelompok, aspek inti dari egoisme individu atau kolektif, produk tindakan sosial atau politik, atau produk dari wacana yang beragam dan bersaing (Acharya, 2017).

Acharya menambahkan, untuk memahami identitas ASEAN, kita perlu mempertimbangkan empat faktor: *pertama*, definisi. Identitas ASEAN mungkin dipahami sebagai identitas kolektif yang didefinisikan sebagai "sebuah proses dan kerangka kerja tempat negara anggotanya secara perlahan mulai beradaptasi dengan 'keberadaan regional' dalam rangka mengurangi kemungkinan penggunaan kekerasan dalam hubungan antar-negara" (Acharya, 2017). *Kedua*, pengukuran secara kualitatif yang memuat karakterisasi identitas kolektif yang berada dalam kontestasi, sehingga identitas ASEAN harus memiliki (1) *norma-norma konstitutif*, atau norma-norma hukum-politik dan sosial-budaya yang telah dikembangkan dan berkembang sejak berdirinya ASEAN, seperti prinsip non-

interferensi, penyelesaian perselisihan secara damai, saling menghargai kemerdekaan masing-masing, dan saling menghargai integritas teritorial masing-masing; (2) *tujuan sosial*, yakni otonomi regional, ketahanan regional, dan kerja sama regional yang telah ditulis baik secara implisit maupun eksplisit dinyatakan dalam dokumen ASEAN sejak pendiriannya; (3) *perbandingan relasional*, yakni identitas diri yang diperoleh dari ASEAN bukan sebagai sebuah komunitas kolektif pertahanan tetapi komunitas keamanan; (4) *model kognitif*, yakni pandangan dunia umum elit Asia Tenggara tentang Perang Dingin dan dunia pasca-Perang Dingin. *Ketiga*, dalam konteks ASEAN, identitas kolektif adalah variabel perantara (*intervening variable*) yang membatasi identitas ASEAN, memungkinkan, membentuk serta mempengaruhi orientasi dan pilihan kebijakan. *Keempat*, identitas ASEAN dipahami baik dalam tipologi dan dimensi yang konstitutif, meskipun tumpang tindih baik dalam levelnya (identitas lokal, nasional, dan regional), lapisan-lapisannya (kelompok-kelompok etnik, negara, dan transnasional), bentuknya (dikotomi antara individu-negara, individu-bangsa, masyarakat-bangsa, bangsa-negara, nasional-regional), maupun tipenya (berpusat pada elit atau berpusat pada orang banyak) (Acharya, 2017).

Sumber identitas ASEAN itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni sebagai

“masyarakat” (*Gesselschaft*) dan “komunitas” (*Gemeinschaft*). Menurut Tönnies (2001), komunitas (*Gemeinschaft*) merupakan kelompok sosial yang eksis karena ikatan afirmasi mutual yang positif dengan pembagian beban dan pencapaian di dalam keragaman yang menyatu (*unity in diversity*) secara organis, sedangkan masyarakat (*Gesselschaft*) pengandaian persatuan tersebut dikonstruksi secara mekanistik dan berupa ide (Tönnies, 2001: 17-19). Buzan (2004) menunjukkan bahwa pengertian “masyarakat” berakar pada kalkulasi kepentingan pribadi (*self-interest*), sedangkan “komunitas” berasal dari tradisi dan afeksi. Dalam pendekatan ini, masyarakat merupakan pengaturan rasional atas adaptasi timbal-balik kepentingan dan berbasis beberapa jenis nilai bersama yang memungkinkan aktor membuat kontrak yang mengatur perilaku dan interaksi mereka. Di sisi lain, sebuah komunitas “merasa dimiliki bersama, merupakan ‘kita’ yang membedakan dirinya dari yang lain, tidak ada komunitas tanpa rasa komunitas” (Buzan, 2004: 74). Penentuan karakter dasar identitas kolektif ASEAN tergantung dari sisi mana yang diprioritaskan. Meskipun Piagam ASEAN dan Bali Concord II menempatkan ASEAN sebagai “komunitas” (*Gemeinschaft*), namun karakter relasi yang lebih rasional dan kalkulatif (“instrumentalistik”) membuktikan sebaliknya (Acharya, 2017).⁹

Di samping itu, institusi regional diciptakan oleh negara-negara yang memiliki

⁹ Naskah aslinya berbunyi demikian, “ASEAN has become a security community in that Southeast Asian states have grouped themselves together for regional cooperation, have shared stable expectations of peaceful change, and have ruled out the use of force in settling disputes and problem solving. Equally important, ASEAN has become such a security community because of the deepening “we-feeling” that they share as constitutive of collective identity

formation... ASEAN has become a nascent security community in that Southeast Asian states have increased their mutual security through regional cooperation, have forged regional identity without diluting their national identities, and have practiced soft regionalism without making ASEAN a supranational organization emasculating their sovereignty and independence.”

kepentingan diri (*self-interested*), yang membatasi pilihan-pilihan dan strategi negara tersebut. Mereka pada dasarnya tidak mengubah kepentingan dan identitas negara (sebagai aktor yang egois). Sebagaimana neo-realisme, neoliberalisme memahami kepentingan negara sebagai sesuatu yang terberi. Kepentingan tetap eksogen terhadap proses interaksi antar-negara yang terjadi dalam lingkungan yang terinstitusionalisasi. Interaksi semacam itu pada dasarnya tidak mengubah kondisi anarki (Acharya, 2001: 3). Institusi regional, termasuk yang menunjukkan karakteristik komunitas keamanan, dapat mempelajari norma mereka dari organisasi global atau kelompok regional lainnya, sebab norma mereka berasal dari lingkungan sosial, budaya dan politik setempat. Norma-norma ASEAN berasal dari gabungan dua sumber ini (Acharya, 2001: 47).

ASEAN dalam Piagam ASEAN memiliki motto “*One Vision, One Identity, One Community*” atau sering diringkas sebagai “*Unity in Diversity*”. Problemanya, *ASEAN Way* bukan merupakan realitas objektif, melainkan sebuah konsep yang dikonstruksi melalui praktik-praktik “diplomasi lembut”, konsensus, informal, dan non-legalistik. “Ciri” regionalisme semacam itu menjadi “cara” ASEAN dalam relasinya dengan sesama negara anggotanya dan negara-negara lain di luar kawasan, dalam kapasitasnya sebagai satu kawasan.

Bagi Acharya, norma sosio-kultural memainkan peran penting dalam menciptakan interaksi dan kompromi ini yang melibatkan posisi nasional yang berbeda. Sedangkan norma hukum-rasional dan sosial budaya sangat penting dalam konstruksi dan ekspresi identitas kolektif. Sumber norma hukum-rasional ASEAN terletak dalam struktur dan dinamika sistem internasional pada umumnya, gagasan “*ASEAN Way*” didirikan di atas unsur-unsur informalitas, konsultasi (*musyawarah*) dan konsensus (*mufakat*), yang diklaim merupakan warisan budaya Asia Tenggara yang unik (Acharya, 2009: 55).

Oleh karena itu, lebih baik memikirkan identitas regional ASEAN sebagai suatu proses dialektis antara komponen-komponen material (keamanan dan ekonomi) dan komponen-komponen immaterial (*sense of belonging*, ‘perasaan sebagai kita’, dan lain-lain); suatu “menjadi” (*becoming*), alih-alih sesuatu yang memiliki esensi atau “ada” (*being*). Perasaan sebagai suatu “komunitas” merupakan suatu yang sulit diukur, kalau bukan mustahil. Istilah “komunitas” itu sendiri, sebagaimana dirangkum oleh Clark (2007), mengalami banyak pergeseran makna. Clark mengutip berbagai sumber untuk menunjukkan kecenderungan ini, namun benang merah yang ditarik Clark berkaitan dengan konsep *sense of belonging*.¹⁰ Sebagai *Gemeinschaft* dalam pengertiannya yang tradisional, komunitas

¹⁰ Naskah dari Clark berbunyi demikian, “Istilah ‘komunitas’ merangkum isu-isu identitas dan kepemilikan, kesamaan dan perbedaan, inklusi dan pengucilan, tempat dan waktu, proses seperti modernisasi, dan telah dianggap sebagai fenomena spasial dan sosial (Bell dan Newby, 1971; Cater dan Jones, 1989; Allen, 1994; Delanty, 2003; Johnston, 2000; Silk, 1999). Beberapa menekankan komunalitas istilah tersebut, seperti Sutra (1999: 6), memberi saran bahwa ini mencakup ‘kebutuhan dan sasaran

bersama, rasa kebaikan bersama, kehidupan bersama, budaya dan pandangan dunia, dan tindakan kolektif.’ Yang lain mengeksplorasi aspek relasional dari istilah tersebut, menunjukkan bahwa ia menawarkan ‘istilah singkatan yang mudah digunakan untuk wilayah luas pengaturan sosial lokal di luar lingkungan pribadi keluarga dan keluarga namun lebih akrab bagi kita daripada institusi impersonal masyarakat luas’ yang dapat diidentifikasi dalam ‘jaringan sosial yang saling terkait,

terletak pada pemaknaan diri sebagai bagian dari sesuatu yang lain, ikatan-ikatan, dan koneksi-koneksi yang kita lakukan secara-umumnya – voluntaristik, persis karena adanya *sense of belonging* tersebut.

Dalam kaitannya dengan *The ASEAN Way, musyawarah untuk mufakat* sebagai norma dasar jelas merupakan suatu sistem diskursus yang menitikberatkan pada kesepakatan-kesepakatan berbasis rasa saling percaya secara kolektif dan jaminan bahwa semua orang akan memegang janjinya. Di sini perbedaan sistem *musyawarah untuk mufakat* dengan demokrasi deliberatif ala Barat, menurut klaim Muzakki (2013) yang meskipun sama-sama ingin mencapai konsensus (*mufakat*), namun memiliki dimensi epistemologis yang berbeda. Muzaqqi menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif ala Barat berbeda dengan sistem *musyawarah untuk mufakat* dalam hal perbedaan *raison d'être*-nya. Menurutnya, demokrasi deliberatif ala Barat berakar pada pemahaman atas asas-asas negara hukum yang sudah ada dan merupakan upaya meradikalkan demokrasi perwakilan dengan menekankan pada pemeriksaan publik (*public scrutiny*) terhadap keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah. Deliberasi adalah soal “prosesnya”, bukan hasilnya (Muzaqqi, 2013: 125). Dalam artikel lain Muzaqqi melanjutkan bahwa *musyawarah untuk mufakat*, bagi para pendiri bangsa termasuk Muhammad Hatta, merupakan corak demokrasi yang asli, yang berbeda dari *counterpart*-nya di Eropa.

Namun demikian Hatta sadar bahwa konsepsi demokrasi ini rawan ditelikung dalam praktiknya, mengingat kekuasaan di Nusantara dahulu acap dijalankan secara autokrasi dan feodalistik (Muzaqqi, 2012: 73). Dalam artikel yang sama Muzaqqi melanjutkan bahwa Hatta mempersepsikan *musyawarah untuk mufakat* sebagai konsep demokrasi-desa yang bersendikan gotong-royong atau kolektivisme oleh rakyat, sementara itu para raja atau sultan memerintah secara autokrasi atau feodalistik. Hatta, dalam Muzaqqi (2012), menandakan bahwa,

“Kollektivisme artinya milik bersama dan usaha bersama. Milik bersama ada atas tanah, satu alat produksi yang terpenting dalam masyarakat kita... dan sifat kolektivisme bertentangan dengan keadaan yang orang seorang dijadikan pangkal perusahaan. Yang kemudian ini cocok dengan sistim individualisme atau individualisme yang dibatasi oleh kooperasi... Milik kolektif atas satu alat produksi (tanah) tidak mau dijalankan dengan pembagian, melainkan dengan usaha bersama! Berdasar kepada milik bersama atas tanah, maka haruslah tanah itu tidak dibagi-bagikan dahulu kepada tiap-tiap orang, melainkan terus diusahakan bersama atas pimpinan mupakat...”

Musyawarah untuk mufakat berbeda dengan demokrasi deliberatif seturut pandangan Jürgen Habermas (1997) yang “mengarahkan perhatiannya atas kedaulatan

persahabatan dan persahabatan’ (Crow and Allen, 1994: 1). Jelas, ada berbagai cara untuk mendekati pertanyaan masyarakat. Ini termasuk komunitas yang didasarkan pada lokasi geografis yang dekat (misalnya Mackenzie dan Dalby, 2003; Staheli dan Thompson, 1997), masyarakat sebagai sistem sosial sosial yang mengikat kelompok dan institusi sosial (misalnya Allen dan

Hamnett, 1995; Gandy, 2002; Miller, 1993) atau komunitas sebagai bentuk persekutuan berdasarkan identitas umum atau serangkaian kepercayaan dan praktik (misalnya Lave, 2003; Radcliffe, 1999). Namun semua tampak bersatu di seputar usaha untuk memahami ‘kepemilikan’ (belonging).”

populer melalui diskursus publik dengan negara untuk mencapai konsensus moral (keadilan) rasional di tengah kecenderungan refeodalisasi dan komodifikasi ruang-ruang publik dalam masyarakat modern” (Muzaqqi, 2012: 75). Muzaqqi mengklaim, jika demokrasi deliberatif ala Habermas atau Barat pada umumnya menekankan kepada dimensi politik, maka dalam konteks politik Hatta menekankan *musyawarah untuk mufakat* oleh rakyat sendiri dan “demokrasi ekonomi” berbasis kolektivisme yang diformulasikan dalam pengertian “milik bersama” dengan sifat “tolong-menolong” (Muzaqqi, 2012: 75-76).

Sifat-sifat *musyawarah untuk mufakat* ini bersesuaian dengan sifat-sifat voluntaristik, meski dalam beberapa aspek juga menunjukkan perbedaan signifikan. Misalnya dalam konteks bahwa kegiatan voluntaristik merupakan kegiatan yang tidak dibayar, bukan pengganti kegiatan komersial, bukan pengganti tenaga kerja berbayar, merupakan kegiatan yang melibatkan pilihan bebas, dan sebagainya. Namun pada intinya, kegiatan voluntaristik merupakan kegiatan yang bebas dari paksaan, sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi norma dasar *ASEAN Way*. Dengan ciri ini, ASEAN sebagai komunitas yang plural dan multikultural diharapkan dapat mencapai pengertian dan pemahaman (*understanding*) mengenai diri dan kawasannya, sesuai slogan *Unity in Diversity* yang diusungnya.

Dalam pelaksanaan tugas voluntaristiknya, para pemuda melalui organisasi transnasional atau regional dapat

berkontribusi dalam diseminasi dan pembangunan identitas regional, yang pada gilirannya dapat membantu memperkuat kohesi antar-bangsa dalam sebuah kawasan untuk memenuhi kepentingan kawasan tersebut. Dalam kawasan ASEAN terdapat beberapa organisasi pemuda berbasis voluntarisme. Dua yang cukup menonjol adalah *ASEAN Youth Organization* (AYO) dan *ASEAN Youth Volunteer Program* (AYVP). Organisasi yang disebut belakangan akan menjadi fokus studi dalam naskah ini karena secara eksplisit nama organisasi ini memuat dua kata kunci penting diskusi mengenai kontribusi voluntarisme pemuda terhadap pembentukan identitas regional ASEAN.

4. ASEAN Youth Volunteer Program: Reifikasi Identitas Regional melalui Komunitas Tanggap Bencana Berbasis-Pengetahuan

Cikal-bakal AYVP muncul di tahun 2003 ketika para pemimpin di Asia Tenggara menindaklanjuti ASEAN Concord II (alias Bali Concord II), terutama poin kelima dari tiga *framework* (keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya), yakni “komunitas akan mengasuh bakat dan mempromosikan interaksi di antara cendekiawan, penulis, seniman, dan praktisi media di ASEAN untuk membantu melestarikan dan mempromosikan warisan budaya ASEAN yang sangat beragam seraya merawat identitas regional serta menumbuhkembangkan kesadaran orang mengenai ASEAN (asean.org, 2017).”¹¹ Menurut situs web AYVP, organisasi ini

¹¹ Naskah yang dimaksud aslinya berbunyi, “*The Community shall nurture talent and promote interaction among ASEAN scholars, writers, artists and media practitioners to help preserve and promote ASEAN’s diverse cultural heritage while fostering regional identity as well as cultivating*

people’s awareness of ASEAN” (asean.org, 2017). Cetak tebal dari penulis. Diambil dari Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii tanggal 3 Agustus 2017

merupakan “sebuah mimbar kaum muda yang bersifat sukarela dengan tujuan menciptakan peluang dalam voluntarisme berbasis pengetahuan, mendukung pertukaran pengalaman belajar, mengembangkan kapasitas, meningkatkan pemahaman lintas budaya, dan menempa rasa identitas regional seraya membuat perbedaan yang berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh ASEAN” (ayvpukm.com.my, 2017).¹²

AYVP didahului oleh kelahiran sebuah program yang bernama *ASEAN Volunteer Program* (AVP) yang didirikan setelah terjadinya topan di Nargis, Filipina 2008. Pada waktu itu ASEAN menjalankan sebuah gerakan voluntaristik yang membantu pembangunan kembali 3 desa di Irrawaddy Delta di Myanmar. Sekitar 40 relawan dari Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, Fipilina, Singapura, Kamboja, dan Malaysia berpartisipasi dengan masyarakat sekitar dalam tujuh projek rekonstruksi. Gerakan ini dianggap berhasil dan kemudian dikembangkan sebagai program yang berkelanjutan. Selain itu ada sebuah organisasi di bawah naungan ASEAN yang bergerak di bidang sukarela untuk para pemuda yaitu *ASEAN Young Professionals Volunteer Corps* (AYPVC) yang disahkan pada 22 Mei 2013 di Brunei Darussalam yang ditujukan untuk menciptakan semangat berkolaborasi dan kebersamaan sesama pemuda profesional di ASEAN melalui sebuah organisasi formal. Tujuan lain dari AYPVC adalah berkontribusi terhadap pembangunan sosial-budaya para pemuda di ASEAN serta membawa masyarakat untuk

saling berdekatan dan merealisasikan *ASEAN Community 2015* (Prawira, 2017: 20).

AYVP adalah sebuah program kerjasama bersama *United States Agency for International Development* (USAID) dan sekretariat ASEAN. Program ini ditujukan kepada pemuda dan berbasis *knowledge-driven*. Program ini diajukan pada 20 Oktober 2011 pada pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth VII* di Hanoi oleh Menteri Olahraga dan Pemuda Malaysia, Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheek dan mendapat dukungan dari Sekretariat ASEAN. Melalui inisiatif Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia menjadi tuan rumah dalam seminar AYVP pertama berjudul “*Towards the Development of the ASEAN Youth Volunteer Programme: Building a Strategic Roadmap for Productive and Sustainable Knowledge-driven, Sports and Post Disaster Recovery Volunteerism across ASEAN*” pada Mei 2012. Sekitar 50 delegasi yang mengikuti seminar tersebut terdidi atas para pemuda-pelajar yang memiliki niat untuk menjadi relawan membantu sesama, serta beberapa praktisi dari *Non-Governmental Organization* (NGO) yang memiliki bidang dalam relawan pengembangan lingkungan, bencana alam, dan konservasi mengenai warisan-warisan pusaka (Prawira, 2017: 21).

AYVP bertugas untuk mengembangkan para relawan muda usia 18-30 tahun yang mempunyai pendidikan tinggi kuliah atau sudah bekerja. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk membentuk para pemuda dari kawasan Asia Tenggara agar peduli dengan sesama masyarakat ASEAN

¹² Naskah yang dimaksud aslinya berbunyi, “*The ASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) is a dedicated youth volunteerism platform that intends to create opportunities in knowledge-driven volunteerism, support the exchange of learning experiences, develop capacity, enhance cross-*

cultural understanding, and forge a sense of regional identity while making a sustainable difference to communities across ASEAN.” Diambil dari <http://www.ayvpukm.com.my/about-us/> tanggal 3 Agustus 2017.

serta membentuk suatu pemahaman mengenai pentingnya pembentukan identitas regional dari yang berbeda-beda budaya namun dapat bergabung dalam suatu program berbasis voluntarisme. Program AYVP yang sudah dilaksanakan antara lain pada Agustus 2013 di Malaysia, kemudian 2014 di Malaysia, 2015 di Kamboja, dan 2016 di Filipina. Peserta dipilih melalui wawancara dan esai mengenai tema program yang dibuat oleh panitia AYVP. AYVP membuat 8 tema yang menjadi program kerjanya, mulai dari tema mengenai lingkungan, perlindungan terhadap warisan budaya, respon tanggap bencana alam dan penanggulangannya, perkembangan di daerah pedesaan dan pengikisan kemiskinan, kewirausahaan sosial, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan rekreasi atau olahraga. Dari 1500-2200 orang pelamar yang diterima hanya 45-51 orang. Peserta diberikan pendidikan dan *workshop* mengenai prinsip program AYVP yaitu, salah satunya, tentang kesadaran terhadap identitas yang sama di kawasan ASEAN, pendekatan untuk mendorong sebuah identitas dengan melakukan pendekatan melalui komunitas (Prawira, 2017: 21).

Kerangka kerjasama ASEAN terhadap pemuda tercantum di Piagam ASEAN memuat salah satu tujuan, yaitu “mempromosikan ASEAN yang berorientasi kepada manusia dengan didorong oleh segala sektor masyarakat untuk berpartisipasi serta mendapat manfaat dari integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN” (ASEAN, 2014).¹³ Pemuda menjadi sektor penting yang dihargai oleh ASCC (*ASEAN Socio-Cultural Community*). ASCC merupakan cerminan tujuan umum dari pembangunan komunitas, yang dalam

praktiknya membutuhkan intervensi melebihi ruang lingkup antar-pemerintah (*inter-governmental sphere*). Artinya organisasi yang resmi dan formal seperti ASEAN harus bekerjasama dengan organisasi sosial di bawah naungan mereka, seperti AYVP. Dengan demikian seluruh sektor masyarakat secara luas dapat mendukung, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari proses integrasi di ASEAN dan pembangunan komunitas sosial, terutama untuk pemuda (Prawira, 2017: 24).

Setelah satu tahun berjalan, AYVP melakukan kegiatannya pertama kali di Malaysia pada 15 Agustus 2013. Kegiatan ini diikuti para relawan atau disebut “*eco-leaders*” yang berasal dari beberapa negara di ASEAN serta mahasiswa lokal Malaysia yang ingin mengikuti kegiatan bertema *environmental conservation*. Program ini berjalan selama 3 minggu di Malaysia. Para relawan muda dan *eco-leader* yang berasal dari berbagai macam latar belakang ini diberi informasi dan edukasi mengenai lingkungan oleh *Malaysian Nature Society* (MNS). Mereka mengunjungi beberapa pameran yang berfokus kepada konservasi lahan basah (*wetlands*). Setelah selesai menjalani program ini para *eco-leaders* memperoleh pengetahuan untuk diimplementasikan kembali ke negara asal masing-masing. Ikatan yang didapat selama tiga minggu mengikuti kegiatan ini tetap dijaga oleh para *eco-leaders* maupun pihak fasilitator di Malaysia melalui sebuah grup pertemanan di *facebook* (Prawira, 2017: 26).

Pada 2014 AYVP mengadakan program yang bertema “*Protecting ASEAN’s Heritage*”. Kegiatan ini dimulai pada 11 Agustus 2014 dan dilakukan selama 5 minggu. Kegiatan ini merupakan kerjasama

and benefit from, the process of ASEAN integration and community building”.

¹³“...to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in,

AYVP atas naungan sekretariatnya, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), dengan berkolaborasi dengan *Ministry of Tourism and Culture* Malaysia, Sekretariat ASEAN, *Ministry of Youth and Sports Malaysia*, dan *University of Malaya*. AYVP 2014 diikuti oleh 1400 pendaftar dari berbagai negara ASEAN dan luar ASEAN. Para peserta ini dijuluki sebagai “*heritage-leaders*.” Para *heritage-leaders* diberi pengetahuan mengenai identitas ASEAN, pemahaman lintas budaya, pendekatan melalui komunitas, dan *heritage conservation*. *Heritage-leaders* dibagi menjadi tiga kelompok dan membuat sebuah presentasi mengenai tiga budaya dominan yang ada di Malaysia. Dalam waktu 3 minggu mereka harus meneliti dan memahami setiap budaya, kemudian hasilnya dipresentasikan di ujung acara diikuti dengan pameran budaya masing-masing. Pameran ini digelar di UKM yang mengajak masyarakat lokal untuk melihat kegiatan promosi lintas budaya satu sama lain agar ada rasa kesadaran terhadap kekayaan dan keragaman budaya yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN (Prawira, 2017: 21).

Pada 2015 AYVP menggelar program yang bertema Perubahan Iklim dan Lingkungan yang dilaksanakan di Kamboja. Dari 2500 pendaftar, yang diterima berjumlah 49 peserta yang terpilih. Kali ini AYVP bekerjasama dengan UKM, *Institute of Technology of Cambodia*, *United States Agency for International Development (USAID)*, *International Federation of Red Cross, Red Crescent Societies (IFRC)*, *ASEAN Secretariat*, *Ministry of Youth and Sports Malaysia*, dan *Ministry of Education, Youth and Sports Cambodia*. Kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu. Para pesertanya adalah mahasiswa, profesional muda, dan anggota NGO. Peserta

mendapatkan ilmu mengenai perubahan iklim dan lingkungan serta diberikan *workshop* mengenai *project development*, *proposal writing*, *budgeting*, *log frame development*, dan *evaluation and monitoring*. Di akhir sesi para sukarelawan melakukan presentasi terhadap budaya dari negara masing-masing yang dihadiri oleh para panitia dari AYVP dan masyarakat lokal (Prawira, 2017: 22).

Dalam program-program AYVP, peserta diajarkan untuk bekerjasama dalam tugas yang diberikan. Seperti contoh saat di Malaysia para peserta harus bekerjasama dalam mengerjakan tugas dokumentasi mengenai tiga budaya yang ada di Malaysia (budaya masyarakat keturunan India, Tionghoa, dan Melayu). Dokumentasi tersebut kemudian ditampilkan dan dipresentasikan di penghujung program. Peserta dituntut untuk saling bekerjasama dan saling mengenal satu sama lain sepanjang satu bulan durasi kegiatan. Kerjasama dan saling mengenal satu-sama lain membentuk solidaritas dari sesama peserta terpilih. Indikator peningkatan kesadaran pemuda mengenai ASEAN dapat dilihat dari partisipasi peserta yang mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti program AYVP. Dari setiap ribuan pendaftar yang diterima hanyalah kurang dari 60 orang. Para pemuda ini dipilih berdasarkan kriteria niat dan keinginan yang kuat untuk membantu orang lain, serta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di negara asal mereka agar ada kesinambungan (Prawira, 2017: 23). Ruang lingkup yang kecil itu membuat para peserta untuk mudah mengenal satu sama lain, sehingga memenuhi unsur *Geimenschaft* dalam pengertian tradisionalnya.

Indikator pemahaman lintas budaya (*cross-cultural understanding*) dapat dilihat

dari adanya pagelaran di akhir acara yang dilakukan AYVP yang mempromosikan budaya dari masing-masing negara dan dihadiri tidak hanya peserta relawan, melainkan juga masyarakat lokal dan pemerintah dari negara penyelenggara. Relawan juga bersosialisasi dan hidup dengan masyarakat lokal yang membuat pemahaman antar budaya semakin nyata. Selain itu pendidikan mengenai kesadaran terhadap budaya yang multikultur di kawasan ASEAN dilakukan melalui sosialisasi pada saat awal kegiatan, dalam *workshop* yang diberikan, dan melalui sosialisasi melalui media sosial atau televisi yang ditayangkan oleh AYVP.

5. Voluntarisme sebagai Basis Identitas Kolektif/Regional

Dalam konteks pembentukan AYVP, secara normatif bencana alam memang bukan pilihan utama, atau bahkan sama sekali bukan pilihan, sebagai latar penyatuan individu-individu yang berbeda latar belakang agar dapat bekerjasama dengan damai. Namun menghadapi kuasa alam yang demikian dahsyat, seluruh kategorisasi dan klasifikasi artifisial untuk mendiferensiasi manusia ke dalam kelompok-kelompok sosial menjadi sama sekali tidak relevan. Tentu saja bencana bukan merupakan faktor utama pembentukan identitas kolektif, karena tidak satupun dari kita yang ingin tertimpa bencana, namun aspek-aspek kemanusiaan universal dan kosmopolitanistik tidak dipungkiri lagi sangat menonjol.

Tagatac (2005) menjelaskan bahwa ASEAN telah membuat sebuah formulasi mengenai rencana untuk membentuk integrasi sesama negara anggota di kawasan Asia Tenggara agar dapat menerima sebuah identitas regional yang dianggap menjadi ciri khas kawasan ASEAN. Ia menemukan ciri

khas identitas regional yang terbentuk melalui norma-norma bersama yang dimiliki oleh setiap masyarakat di kawasan Asia Tenggara. *Regional volunteering* dapat menciptakan adanya identitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan mengembangkan kegiatan sukarela di sebuah kawasan melalui nilai "*the will of collective*". Ia juga melihat adanya perubahan pandangan masyarakat di ASEAN mengenai norma yang sebelumnya cenderung bersifat nasionalistik menjadi regionalistik atau perubahan cara pandang *state-centric* menjadi *region-centric* akibat adanya perkembangan *interest* di antara negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini direalisasikan dengan adanya suatu tujuan di Piagam ASEAN, yaitu dengan mempersatukan Asia Tenggara dalam satu visi yang sama dan mengikat sejarah yang berbeda-beda dan peduli dengan budaya yang banyak namun terikat dengan suatu identitas yang sama yaitu bersatu di dalam keberagaman (Tagatac, 2005).

Status identitas regional ASEAN yang sedang dalam proses "menjadi" (*becoming*) dapat dijelaskan dalam sudut pandang *life cycle of norms of international organization* dari Sikkink dan Finnemore (1998). Sudut pandang ini sesuai untuk membahas kembalinya norma sebagai hal yang penting dalam relasi internasional, serta menjelaskan sosialisasi dan institusionalisasi norma-norma tersebut dalam *setting* organisasi internasional yang dinamis, alih-alih statis. Pada titik ini, Sikkink dan Finnemore memodelkan pendekatannya dengan "daur hidup" (*life cycle*) norma-norma. Norma merujuk kepada standar perilaku yang tunggal, sedangkan institusi menekankan cara penyusunan aturan bersama dan saling berkaitan (kumpulan praktik dan peraturan). Norma melibatkan standar perilaku yang

dianggap “benar” atau “tepat”, sehingga pembicaraan mengenai norma akan selalu melibatkan dimensi intersubjektif dan evaluatif (Sikkink dan Finnemore, 1998: 891-892).

Di sisi lain sebuah institusi sering kali dikaitkan dengan norma. Institusi terbentuk akibat adanya norma yang dimiliki sama oleh para aktor tersebut. Sikkink dan Finnemore menjabarkan beberapa variasi definisi norma lainnya seperti; *regulatory norms* yaitu norma yang mengatur negara untuk bisa atau tidak bisa berkehendak, *constitutive norms* yaitu norma yang mengatur aktor-aktor, perilaku-perilaku dan *interest* yang baru, serta *prescriptive norms* yang menetapkan aksi dan non-aksi yang akan dipakai dalam keadaan tertentu. Dalam kaitannya dengan norma-norma yang diberlakukan secara internasional, terdapat asumsi *two level game* yang melibatkan penentuan norma secara domestik dan internasional. Norma-norma domestik sangat berkaitan dengan cara kerja norma-norma internasional. Banyak norma internasional yang dimulai sebagai norma domestik dan menjadi internasional melalui usaha “*norm entrepreneurs*” dari berbagai jenis. Di samping itu, norma-norma internasional harus selalu memosisikan mereka melalui saringan struktur domestik dan norma-norma dalam negeri yang dapat menghasilkan variasi penting dalam kepatuhan dan interpretasi norma-norma tersebut (Sikkink dan Finnemore, 1998: 893). Menurut keduanya, pembentukan norma internasional ini melalui tiga tahap, yaitu (1) *norm emergence*; (2) *norm cascade*; dan (3) *norm internalization*.

Life cycle of a norm adalah sebuah daur hidup untuk menjelaskan kumpulan ide yang terbagi (*shared ideas*) berubah menjadi sebuah norma yang dianut bersama. Tahapan pertama adalah munculnya norma

(*norm emergence*). Pada tahap ini, aktor pembentuk norma (*norm entrepreneurs*) meyakinkan massa di dalam suatu negara untuk mengadopsi norma baru. Tahap kedua yaitu *norm cascade* merupakan penerimaan ide secara umum menjadi norma melalui imitasi. Setelah kedua tahap tersebut terlaksana maka daurnya akan menuju tahap terakhir yaitu *norms internalization*. Pada tahap ini norma akan menjadi pemahaman mengenai fakta dalam hidup yang *taken-for-granted*. Norma ini akan mempengaruhi dan menentukan peran dan aksi negara-negara yang menganut norma tersebut.

Tabel 3. Tiga Tahap Pembentukan Norma Internasional

The Life Cycle of an International Norm: Finnemore and Sikkink 1998

	Stage 1: Norm emergence	Stage 2: Norm cascade	Stage 3: Norm Internalization
Actors	Norm entrepreneurs with organizational platforms	States, international organizations, networks	Law, professions, bureaucracy
Motives	Altruism, empathy, ideational commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
Dominant Mechanisms	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Sikkink dan Finnemore menjelaskan bahwa sebuah norma dapat mengubah lingkungan sosial yang ada di sebuah kawasan. Contohnya pada saat kejadian bom di Nagasaki dan Hiroshima 1945. Dengan kejadian tersebut, masyarakat internasional melihat adanya dampak jangka panjang yang sangat berbahaya akibat bom nuklir. Di samping itu muncul pula empati global. Dengan demikian kejadian tersebut membentuk *norms cascade*. Pelarangan penyebaran bom nuklir (*nuclear non-proliferation*) di dunia setelah terjadinya bom

Hiroshima dan Nagasaki merupakan sebuah ide yang diterima oleh masyarakat umum sehingga dianut menjadi norma internasional (Prawira, 2017: 15).

Gambar 1. Tipping Point dalam Daur Hidup Norma

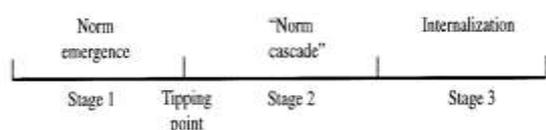


FIGURE 1. Norm life cycle

Sumber: (Sikkink and Finnemore, 1998)

Titik di saat masyarakat mulai mencapai titik untuk menganut norma baru disebut sebagai *tipping point*. Titik ini tercapai apabila sebagian besar dari aktor norma menerima dan menganut suatu norma. Sikkink dan Finnemore mencontohkan, *tipping point* ini sangat menonjol pada saat protes global mengenai hak pemilih wanita (*suffrage*) abad ke-19. Pada saat itu pejuang hak asasi perempuan membentuk *International Campaign for Suffrage Association (IWSA)*. Pada rentang 1890-1930, tidak banyak negara-negara Barat yang mengakui ide tersebut. Hanya beberapa negara yang menerima ide tersebut. Hanya Selandia Baru, Australia, dan Finlandia. Lebih dari 20 negara baru mengadopsi hak pilih untuk wanita setelah tahun 1930. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut pengaruh-pengaruh dari internasional dan transnasional dianggap lebih penting dibandingkan dengan tekanan norma domestik sebuah negara.

Namun demikian, keduanya menandakan bahwa tidak semua norma yang muncul akan sukses mencapai *tipping point*. Demikian pula institusionalisasi bukanlah kondisi yang selalu diperlukan untuk *norm cascade*. Institusionalisasi justru dapat mengikuti inisiasi dari *norm cascade* alih-alih mendahuluinya. Ketika menuju

tipping point, muncul perubahan normatif yang kecil tanpa adanya pergerakan domestik yang signifikan. Namun ketika *tipping point* tercapai, dinamika yang berbeda mulai muncul. Bahkan banyak negara yang mengadopsi norma tersebut tanpa adanya tekanan domestik. Sikkink dan Finnemore menyebut fenomena ini sebagai "penularan" (*contagion*) yang terjadi ketika norma-norma baru, baik di level regional maupun internasional, dianggap lebih penting dari politik domestik. Keduanya meneruskan, dengan mengutip Kenneth Waltz, bahwa mekanisme utama untuk mempromosikan *norm cascade* adalah proses aktif sosialisasi internasional yang dimaksudkan untuk mendorong pemecah norma (*norm breakers*) menjadi pengikut norma (*norm followers*). Dengan kata lain, sosialisasi merupakan mekanisme utama bagi *norm cascades*.

Sosialisasi norma dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya: persaingan (pahlawan), pujian untuk perilaku yang sesuai dengan norma kelompok, dan ejekan untuk penyimpangan (Sikkink dan Finnemore, 1998: 896). Dalam konteks politik internasional, sosialisasi melibatkan pujian atau kecaman diplomatik, baik bilateral maupun multilateral, yang diperkuat oleh sanksi dan insentif material. Namun, keduanya menambahkan bahwa negara bukan satu-satunya agen sosialisasi. Jaringan *norm entrepreneurs* dan organisasi internasional juga bertindak sebagai agen sosialisasi dengan cara menekan pelaku yang ditargetkan untuk mengadopsi kebijakan dan undang-undang baru dan untuk meratifikasi perjanjian dan dengan memantau kepatuhan terhadap standar internasional (Sikkink dan Finnemore, 1998: 902).

Voluntarisme sebagai norma berarti menjadikan kegiatan-kegiatan bermotivasi

voluntaristik sebagai basis, dalam koridor suatu institusi yang berperan sebagai wahana untuk sosialisasi sekaligus institusionalisasi norma tersebut. Menurut definisi PBB, ada tiga karakteristik utama yang menentukan kegiatan voluntaristik. *Pertama*, kegiatan tidak boleh dilakukan terutama untuk imbalan finansial, walaupun penggantian biaya dan beberapa pembayaran token diperbolehkan. *Kedua*, kegiatan tersebut harus dilakukan secara sukarela, sesuai dengan kehendak sendiri individu, walaupun seringkali ada daerah abu-abu di sini, seperti skema layanan masyarakat sekolah yang mendorong (atau terkadang menuntut) siswa untuk terlibat dalam kegiatan sukarela. *Ketiga*, aktivitas itu harus memberi manfaat signifikan bagi orang lain serta bagi relawan itu sendiri. Dalam kerangka konseptual yang luas ini, dapat diidentifikasi setidaknya empat jenis aktivitas relawan: saling membantu atau swadaya; filantropi atau pelayanan kepada orang lain; partisipasi atau keterlibatan warga negara; dan advokasi atau kampanye (United Nations Volunteer Report, 2001).

Dengan mengikuti aturan normatif ini, sesuai dengan TAC ASEAN 1976, maka ASEAN mengikuti norma yang disarankan oleh PBB. Dengan kata lain, pengertian PBB mengenai voluntarisme tersebut menjadi norma yang disosialisasikan dan diinstitusionalisasikan melalui organisasi ASEAN dan organisasi-organisasi sayap ASEAN, termasuk AYVP. PBB menjadi *norms entrepreneur* yang melimpahkan (*cascading*) normativitas ini ke ASEAN, melalui *tipping point* bencana-bencana yang terjadi di Samudera Hindia, termasuk Tsunami 2004, untuk menunjukkan derajat urgensi penerapan norma kolektif demi kepentingan kawasan.

6. Kesimpulan

Sikkink dan Finnemore menjelaskan bahwa identitas negara pada dasarnya membentuk perilaku negara. Pada gilirannya identitas itu dibentuk oleh konteks budaya-institusional dimana negara tersebut bertindak. Konsep sosialisasi menunjukkan bahwa efek kumulatif negara-negara di suatu wilayah yang mengadopsi norma baru mungkin serupa dengan “tekanan teman sebaya” di antara negara-negara dalam satu kawasan. Tiga kemungkinan motivasi untuk menanggapi “tekanan teman sebaya” semacam itu adalah legitimasi, konformitas, dan penghargaan (Sikkink dan Finnemore, 1998: 903-904). Namun kasus bencana dan kegiatan voluntaristik yang mengikutinya membuktikan satu hal lagi yang belum diantisipasi oleh Sikkink dan Finnemore, yakni tindakan altruistik yang dilakukan atas dasar panggilan kemanusiaan, bukan semata-mata kalkulasi rasional-instrumental yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Dalam kasus AYVP, kegiatan ini semakin istimewa karena aktornya bukan lagi negara, melainkan kaum muda yang bergerak atas dasar semangat dan idealisme tertentu, sebau-abu apapun itu. Kegiatan voluntaristik yang dilakukan kaum muda yang diseleksi dalam AYVP ini dapat menjadi contoh reifikasi *ASEAN Way* dalam aktivitas non-profit yang berorientasi menegakkan integrasi kawasan Asia Tenggara melalui dimensi sosio-kultural atau berorientasi pada manusia (*people oriented*), meskipun di sisi lain tendensi elitisnya tetap besar.

Referensi:

Acharya, Amitav. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia:*

- ASEAN and the Problem of Regional Order*. London and New York: Routledge.
- Acharya, Amitav. 2009. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order (2nd Edition)*. London and New York: Routledge.
- Acharya, Amitav and Layug, Allan. 2017. *Collective Identity Formation in Asian Regionalism: ASEAN Identity and the Construction of the Asia-Pacific Regional Order*. Retrieved August 4, 2017, from paperroom.ipsa.org: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_7151.pdf.
- Arnett, Jeffrey Jensen, and Cravens, Hamilton. 2006. "G. Stanley Hall's Adolescence: A Centennial Reappraisal Introduction". *History of Psychology* 2006, Vol. 9, No. 3, pp.165–171.
- ASEAN Youth Volunteer Program. 2017. *About US : AYVP*. Retrieved August 4, 2017 from AYVP ABOUT US: <http://www.ayvpukm.com.my/about-us/>
- Bauman, Zygmunt. 1991. *Modernity and Ambivalence*. Oxford: Polity Press.
- Buzan, Barry. 2004. *From International to World Society: English School Theory and the Social Structure of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clark, Andrew. 2007. "Understanding Community: A Review of Networks, Ties and Contacts." *NCRM Working Paper Series*. Leeds, Manchester, United Kingdom: ESRC National Centre for Research Methods.
- Finnemore, Martha and Sikkink, Kathryn. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization*, Vol. 52, No. 4, *International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Autumn, 1998)*, pp.887-917.
- Guan, BennyTeh Cheng. 2004. "ASEAN's Regional Integration Challenge: The ASEAN Process". *The Copenhagen Journal of Asian Studies* 20, pp.70-94.
- Habermas, Jürgen. 1997. "Popular Sovereignty as Procedure". In Bohman, James, and Rehg, William. 1997. *Deliberative Democracy: Essay on Reason and Politics*. Cambridge and London: MIT Press.
- Hollingshead, August de Belmont. 1949. *Elmtown's Youth: The Impact of Social Classes on Adolescents*. New York: Wiley.
- Hustinx, Lesley and Lammertyn, Franz. 2003. "Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological Modernization Perspective". *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* Vol. 14, No. 2, June 2003, pp.167-187.
- Jönsson, Kristina. 2010. "Unity-in-Diversity? Regional Identity-building in Southeast Asia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29, 2, pp.41-72.
- Maley, Mary, Dennis, Lauren and Eckenrode, John. 2015. "Systematic Translational Review: Volunteer Motivation". *Bronfenbrenner Center for Translational Research*.
- Minh, Pham Quang. 2013. "In Search of an ASEAN Identity." *Culture, Power and Practices: The Globalization of Culture and its Implications for Asian Regional Transformations*, pp.171-179.

- Murti, Gita. 2016. "ASEAN's 'One Identity and One Community': A Slogan or a Reality?" Retrieved August 3, 2017, from *Yale Journal of International Affairs*:
http://yalejournal.org/article_post/asean-one-identity-one-community/.
- Muzaqqi, Fahrul. 2012. "Musyawarah Mufakat: Gagasan dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif di Indonesia". *Jurnal Politik Indonesia, Vol 1 No.2, Oktober-Desember 2012*, pp.21-30.
- Muzaqqi, Fahrul. 2013. "Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia". *Jurnal Review Politik Volume 03, Nomor 01, Juni 2013*, pp.123-139.
- Ozawa, Wataru. 2010. "Comparative Study on Volunteerism of Youth in Japan, Korea and Canada: Civil Society and Volunteer Problems". *ISTR (International Society for Third-Sector Research) 9th International Conference*, pp. 125-143. Istanbul: International Society for Third-Sector Research.
- Prawira, Risyad Mulki. 2017. *Peran ASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) dalam Membentuk Identitas Unity In Diversity di Kawasan ASEAN (2013-2016)*. Undergraduate Thesis. Jakarta: Department of International Relations of Bina Nusantara University.
- Tagatac, Paolo Rico Sarthou. 2005. *Forming a Regional Identity in Southeast Asia: The Role of Non-For Profit Organizations and Regional Volunteering*. South Orange, New Jersey, USA: Seton Hall University.
- Tönnies, Ferdinand, and Harris Jose (ed.). 2001. *Community and Civil Society*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- UNESCO. 2017. *What do we mean by "youth"?* Retrieved October 19, 2017 from
<http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/>.
- UNICEF EAPRO. 2008. *Young People's Civic Engagement in East Asia and the Pacific: A regional study conducted by Innovations in Civic Participation*. Bangkok: UNICEF EAPRO.
- U.N. Report. 2001. *United Nations Volunteers Report*. Geneva: UN General Assembly Special Session on Social Development.
- Wyn, Johanna and White, Rob. 1997. *Rethinking Youth*. New South Wales, Australia: Allen & Unwin Pty Ltd.